

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Indeks Kinerja

NAMA INDIKATOR

Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Daerah

TAHUN

2017

KONSEP

- **Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Daerah** adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah yang ditujukan untuk mengawasi agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Badan Pengawasan Daerah** yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Walikota.
- **Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan Daerah baik berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

RUMUS**WALI DATA**

Inspektorat

UKURAN**UNIT**

Inspektur

KEGUNAAN

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Daerah.

INTERPRETASI

Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Daerah menunjukkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah yang ditujukan untuk mengawasi agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETERANGAN

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DOKUMEN

DDA

